

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal dan Buku

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, E. B. (2021). Implementasi Kebijakan Refocusing dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Visioner*, 593-605.
- Nurdiani, D. (2021). Analisis Integrasi dan Koordinasi Terhadap Implementasi Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Covid 19. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 18-38.
- Putri, S. (2021). *Tinjauan atas Penerapan Kebijakan Refocussing dan Realokasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Rabbani, D. S. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Legislatif*, 59-78.
- Sopannah, & Haikal, M. F. (2021). Refocusing Anggaran di Masa Pandemi Covid-19. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1-9.
- Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi APBD untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah daerah "X". *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri*, 235-240.

B. Peraturan dan Dokumen Publik

- Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. (2020). Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ No. 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Jakarta: Biro Umum.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Pemerintah Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Walikota Banjarmasin. (2019, Desember 23). Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Banjarmasin: Sekretaris Daerah.
- Walikota Banjarmasin. (2020, April 6). Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020. Banjarmasin: Sekretaris Daerah.
- Walikota Banjarmasin. (2020, Mei 19). Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020. Sekretaris Daerah.

Walikota Banjarmasin. (2020, Desember 28). Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. Banjarmasin: Sekretaris Daerah.

C. Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Dipetik Desember 31, 2021, dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin: <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan. (2021, Januari 19). Dipetik Desember 31, 2021, dari Redaksi Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20201003/0835219/5-strategi-pemkot-banjarmasin-tuntaskan-covid-19/>

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/>

Fungsi.co.id. (t.thn.). *Fungsi Anggaran: Manfaat, Jenis, Keuntungan, dan Kekurangan*. Dipetik Maret 13, 2022, dari <https://fungsi.co.id/fungsi-anggaran/>

Muliati. (2021, Mei 25). *Format Administrasi Desa*. Dipetik Maret 14, 2022, dari Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran itu Apa Artinya?: <https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2021/05/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran.html>

Mulyono. (2009, Mei 28). *Model Implementasi Kebijakan George Edward III*. Retrieved Maret 17, 2022, from <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>